

Judul : Revisi UU ASN, terbuka peluang PPPK jadi PNS
Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU ASN

Terbuka Peluang PPPK Jadi PNS



Reni Astuti

ANGGOTA Badan Legislati (Baleg) DPR Reni Astuti menyoroti potensi alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Revisi ini akan menjawab persoalan kesenjangan yang selama ini terjadi antara dua status aparatur negara tersebut.

Reni menilai, kesetaraan antara PPPK dan PNS menjadi isu penting yang tak boleh diabaikan, baik dari sisi karier maupun kesejahteraan. Regulasi baru nanti bisa memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh ASN yang telah lama mengabdikan.

"Akankah PPPK menjadi PNS? Ini tema menarik, karena PNS dan PPPK sama-sama ASN, namun memiliki hak keuangan, hak karier, dan hak kesejahteraan yang belum sepenuhnya sama," ujarnya dalam diskusi bertajuk Revisi UU ASN 2025: Peluang Alih Status PPPK Jadi PNS Kian Terbuka? di Kompleks Parlemen, Senayan,

Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dia mengungkapkan, banyak tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berstatus PPPK telah lama bekerja, tapi belum memperoleh kesejahteraan setara dengan PNS. Beberapa di antaranya bahkan masih menerima tunjangan kinerja yang lebih rendah dari rekan seprofesinya.

"Setelah menjadi PPPK, mereka tidak mendapat kesejahteraan sama dengan PNS. Prinsipnya, kita harus memberi apresiasi kepada seluruh ASN yang sudah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tambah politikus Fraksi PKS itu.

Reni mengungkapkan, DPR telah menetapkan revisi UU ASN sebagai salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Pembahasan teknis akan dilakukan oleh Komisi II DPR bersama kementerian terkait.

Baleg, sambungnya, berharap revisi UU ASN ini bisa memberikan solusi terbaik, baik bagi pegawai berstatus PPPK maupun PNS. "Semua masukan dari akademisi, tenaga pendidik, dan para ASN akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di Komisi II," jelas Legislator asal Dapil Jatim I itu.

Selain itu, Reni juga mengingatkan soal pentingnya mempertimbangkan kemampuan fiskal Pemerintah dalam merumuskan kebijakan alih status PPPK menjadi PNS. Diharapkan, langkah tersebut bisa diwujudkan secara bertahap apabila kondisi ekonomi nasional terus membaik. ■ PYB